

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
2024  
PERGUB SUMUT NO 18, BD 2024/ NO 18, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2023; Perda Sumut No. 12 Tahun 2008; Perda Sumut No. 2 Tahun 2017; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 16 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta kaidah pelaksanaannya. Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksud sebagai pedoman dalam: Penyusunan Renja-PD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 28 Juni 2024;
  - Lampiran : 603 hlm.